

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan
Dari : Tim SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
Tanggal : 8 Agustus 2026
Hal : Hasil Pembahasan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja
Triwulan II Tahun 2026

I. DASAR

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3) Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 atas SAKIP Tahun 2025 Nomor: 700/16/ITDAPROV.II/2023 Tanggal 10 September Tahun 2025

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026 dilaksanakan dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan, realisasi anggaran, capaian indikator kinerja, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dan strategi percepatan pelaksanaan program/kegiatan agar target kinerja dan target anggaran Tahun 2026 dapat dicapai secara efektif, efisien, dan akuntabel

III. Hasil Evaluasi dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2026, diperoleh beberapa hal sebagai berikut:

A. Realisasi Anggaran dan Fisik

Total pagu anggaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp47.638.286.566, dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.891.382.269 atau 38,78%. Sementara itu, realisasi fisik tercatat sebesar 43,20%.

Realisasi belanja operasional mencapai Rp17.891.382.269, sedangkan belanja modal belum menunjukkan realisasi pada periode pelaporan yang tercantum dalam laporan.

Pelaksanaan anggaran perlu terus dipantau, khususnya terhadap kegiatan yang memiliki tingkat realisasi keuangan dan fisik yang masih rendah, agar tidak terjadi penumpukan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran pada akhir tahun anggaran.

B. Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	Target 2026	Realisasi	Capaian
	Nilai Maturitas SPIP Terintegrasi	3,16	-	-
	Persentase Tindak Lanjut Temuan APIP	81%	71,1%	87,7%
	Persentase Temuan BPK yang Ditindaklanjuti	75,6%	75%	99,2%
	Level Kapabilitas APIP	Level 3	-	-
	Indeks Pencegahan Korupsi Daerah/MCSP KPK	87	-	-
	Persentase Capaian Pembangunan Zona Integritas menuju WBK	75%	-	-

Dari hasil pembahasan, indikator persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK telah mencapai 75% dari target 75,6% atau tingkat capaian 99,2%.

Persentase tindak lanjut temuan APIP masih sebesar 71,1% dari target 81%, sehingga diperlukan penguatan koordinasi dan pemantauan terhadap perangkat daerah dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan.

Untuk indikator Kapabilitas APIP, pembangunan Zona Integritas menuju WBK, dan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah/MCP, belum ada realisasi periode yang dilaporkan sehingga perlu dilakukan pemutakhiran data dan pemantauan secara berkala.

IV. PERMASALAHAN DAN KENDALA

1. Sebagian indikator kinerja Inspektorat tidak sepenuhnya berada dalam kendali langsung Inspektorat karena pencapaiannya dipengaruhi oleh kinerja perangkat daerah terkait maupun hasil penilaian oleh pihak eksternal.
2. Masih terdapat temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, maupun Inspektorat Daerah yang belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh perangkat daerah.
3. Koordinasi dan komunikasi antara Inspektorat dengan perangkat daerah dalam rangka percepatan tindak lanjut hasil pengawasan perlu lebih dioptimalkan.
4. Masih terdapat indikator kinerja yang realisasinya belum tersedia atau belum diperbarui pada periode monitoring, sehingga diperlukan penguatan mekanisme pengumpulan, pemutakhiran, dan validasi data kinerja.
5. Pelaksanaan beberapa kegiatan dan realisasi anggaran perlu dipercepat dengan tetap memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas output, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. HASIL KESEPAKATAN DAN TINDAK LANJUT

1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian indikator kinerja dan realisasi anggaran setiap program/kegiatan.
2. Meningkatkan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka mempercepat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK.
3. Menyusun daftar monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang memuat perangkat daerah, rekomendasi, status tindak lanjut, kendala, dan target penyelesaian.
4. Melakukan pemutakhiran data capaian indikator kinerja secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara target, realisasi, dan bukti dukung kinerja.
5. Melakukan langkah percepatan terhadap program/kegiatan yang tingkat realisasi keuangan maupun fisiknya masih rendah.
6. Memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pencapaian indikator yang dipengaruhi oleh perangkat daerah lain maupun penilaian eksternal.
7. Melakukan monitoring secara khusus terhadap pencapaian Kapabilitas APIP, Zona Integritas menuju WBK, SPIP Terintegrasi, dan MCP, termasuk memastikan ketersediaan data dan dokumen pendukung.
8. Menjadikan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan II sebagai bahan pengendalian dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada Triwulan III dan Triwulan IV Tahun 2026.

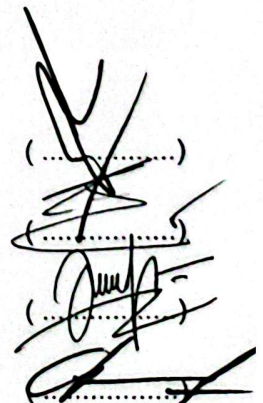
VI. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2026, secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah berjalan, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama percepatan realisasi anggaran dan fisik, peningkatan tindak lanjut hasil pengawasan APIP, serta pemutakhiran dan pencapaian indikator kinerja strategis.

Hasil monitoring dan evaluasi ini selanjutnya menjadi bahan pengendalian dan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan pada periode berikutnya guna mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026.

Tim SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi
Sumatera Selatan,

1. Kurniawan Kantinoko, AP., M.Si., CGCAE (.....)
NIP. 197501081993111001
2. Norman Agung, SE., M.Si
NIP. 197411081999031005
3. Muhammad Zaki Bakri, S.TrIP.
NIP. 199909052021081001
4. Andri Wijaya, SH
NIP.197501272007011020



Dokumentasi

